

## EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR BPKAD KABUPATEN LUWU

Nur Isra Purnamasari<sup>1)</sup>, Antong<sup>2)</sup>, Muhammad Kasran<sup>3)</sup>

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Palopo*

*Email : isra265@gmail.com*

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Penyajian Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Luwu. Data di peroleh melalui wawancara yang di lengkapi dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Luwu telah menggunakan Basis AkruaI sepenuhnya sejak tahun 2015 dan yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Kantor BPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.*

**Kata kunci:** *SAP, berbasis akruaI, Luwu.*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to evaluate the Presentation of Accrual Based Government Accounting Standards in the Luwu City Government. This research is a descriptive qualitative research with case study research method in the Office of Regional Financial and Asset Management Agency of Luwu City. Data obtained through interviews that are completed with documentation studies. The results show that the Luwu Government has used the Accrual Basis fully since 2015 and which includes the recognition, measurement, disclosure, and presentation of revenue, expenditure and financing at the BPKAD Office in accordance with applicable Government Accounting Standards (SAP).*

**Keywords:** *SAP, accrual based, Luwu.*

### PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP Berbasis Kas menuju AkruaI ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu, Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI, Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa: Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, dimana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan tersebut, selanjutnya disusun dengan menggunakan kodifikasi akun 1 sampai dengan 9 sesuai Badan Akun Standar (BAS).

PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian laporan keuangan tujuannya yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan entitas.

Dari penjelasan diatas penulis mengangkat penelitian di kantor badan pemerintah keuangan aset daerah (BPKAD) Kab.Luwu, untuk mengetahui bagaimanakah “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual”. yang diterapkan atas laporan keuangan daerah itu bisa mamenuhi SAP yang sudah ditentukan. Sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual pemerintah bisa mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, agar dapat lebih terukur kinerjanya. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya (good and clean corporate governance) sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai, Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan seluruh pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas laporannya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Akuntansi Pemerintahan**

Sujarweni (2015:18) menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2015:6). Dapat disimpulkan Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintah laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

### **Peranan pelaporan keuangan**

Hariadi, Restianto, & Bawono (2010:122) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

### **Penelitian terdahulu**

Penelitian Manangkalangi (2013) tentang Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Menunjukkan hasil pada Tahun anggaran 2011 pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen. 13 tahun 2006, namun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri No 29 tahun 2002. Beberapa penelitian lain yang terkait antara lain; Ezra Paula Mentu, dan Jullie J. Sondakh (2016) Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan, dan tahap pelaporan, begitu pula dengan laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial masih berdasarkan laporan keuangan berbasis cash Towards Accrual dimana setiap SKPD hanya menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan keuangan realisasi anggaran.

Rintiani (2014) Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2013 diketahui bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diatur pada PP nomor 71 tahun 2010. Langelo (2015) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2011 pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen 13 tahun 2006. Namun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri No 29 tahun 2002. Kesiapan Laporan keuangan kota bitung masih mengacu pada peraturan lama dimana berbasis CTA. Disebut CTA karena untuk realisasi anggaran masih berbasis kas sedangkan neraca berbasis akrual.

Hartina (2009) Analisis penyajian laporan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Langkat. Masih Terjadi kesalahan pencatatan karena menggunakan Kep.Mandagri No.29 tahun 2002. Sinaga (2008) Tinjauan atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Peralatan yang kurang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dan SDM yang masih kurang serta perhitungan APBD yang kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tumiwa (2013) Evaluasi Penerapan Peermendagri No. 21 Tahun 2011 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado. Hasil penelitiannya Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Tuerah (2013) Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Hasil penelitiannya yaitu sistem dan Prosedur telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan. Azwar Rivai Nasution(2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Fadlan Maula (2017) Evaluasi Dan Tantangan Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua Sebagai Wujud Pencapaian Good Governance (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD belum begitu efektif. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan aparatur yang belum sepenuhnya paham dan menguasai SAP berbasis akrual. Namun, manfaat dengan diterapkannya SAP berbasis akrual sudah dirasakan. Tantangan pemerintah dalam menerapkan SAP tersebut ditinjau dari komitmen pimpinan yaitu pemerintah telah mendukung perubahan SAP berbasis akrual dengan adanya regulasi yang jelas yakni sistem, prosedur, dan kebijakan akuntansi ditambah Peraturan daerah dan Peraturan Bupati lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua pada Kabupaten Luwu. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang terkonsentrasi di kantor BPKAD.

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua ” adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini bagian keuangan kantor BPKAD Kabupaten Luwu.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kantor BPKAD berupa laporan keuangan tahun 2016 dan 2017. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis karena penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akral pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu. Objek penelitian dalam studi kasus ini dititikberatkan pada masalah penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akreal yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Populasi pada penelitian ini adalah 24 orang yang merupakan Bagian Keuangan. Karena teknik sampling atau penarikan sampel yang digunakan adalah non probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang didapat berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Belopa dengan Bapak Alimuddin dan Ibu Sri Wahyuni. Akuntansi keuangan pemerintah Kota Luwu merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintah Kota Belopa (Luwu) (dalam hal ini BPKAD) melakukan pelaporan keuangan 1 tahun sekali. BPKAD membentuk laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai tim konsolidasi.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan dua informan, yaitu Bapak Alimuddin dan Ibu Sri Wahyuni selaku Kabid Akuntansi dan Pertanggungjawab Keuangan pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan pemerintah Kota Luwu ketika ditanya akan defenisi dari basis akreal itu sendiri dan telah menerapkan SAP dengan basis akreal sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan informan kendala yang dihadapi dalam menerapkan SAP Akreal yaitu hanya dari sistemnya saja yang kadang-kadang masih sering *error*.

Bapak Alimuddin dan Ibu Sri Wahyuni telah menyampaikan pengakuan dan pengukuran belanja daerah Kota Luwu sesuai peraturan pemerintah dan hal tersebut tidak menyalahi aturan pada PP No. 71 Tahun 2010. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK). Sesuai dengan pernyataan diatas dan pernyataan yang diungkap oleh Bapak Alimuddin dan Ibu Sri wahyuni sebelumnya tidak menyalahi aturan dalam PSAP

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis AkruaI pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu, dalam penelitian ini menemukan; 1). Laporan keuangan BPKAD telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kami telah menerapkan SAP Basis AkruaI sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71 Tahun 2010. Kantor BPKAD telah menyajikan 7 laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni basis akruaI. 2). Kendala dalam penyajian laporan keuangan yaitu hanya pada diawal berlakukannya sistem berbasis akruaI dan setelah itu tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKAD kab. Luwu.

### Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka saran untuk pemerintah daerah yaitu Untuk tahun anggaran berikutnya agar BPKAD tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan penyusunan laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung.2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto,S.2006. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi.Revisi).Jakarta: Rineka Cipta
- Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003), Accrual budgeting and accounting in government and its relevance for developing member countries.
- Bungin, Burhan H.M, 2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta : Kencana
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://fakhrurzypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.

- Hariadi, Pramono., Restianto, Yanuar E., Bawono, Icuk Rangga., 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mahsun, M., (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:
- Noor, Juliansyah. 2011. "Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratmono, Dwi&Mahfud, Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Jogjakarta:
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta
- Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untun Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. *Jurnal Akuntansi/ Tahun X II No.3*.
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 22 Oktober 2015.
- <https://rizamarta.wordpress.com/2012/12/22/pokok-pokok-perbedaan-sap-basis-kas-menuju-akruaI-dengan-basis-akruaI/>